

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Basah Sjachran, 1992, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, Alumni, Bandung
- Jhony Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke 2. Bayumedia Publishing, Malang,
- Latif Abdul, 2014, *Hukum Administrasi Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta
- Prajudi Atmosudirjo, 2003, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Rachmadi Usman, 2003, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ridwan HR, 2001, *Hukum Administrasi Negara*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Rochmat Soemitro, 1998, *Peradilan Tata Usaha Negara Bandung*, Refika Aditama, Jakarta
- Saptomo Ade, 2004, *Metode dan Jalan Dalam Bidang Ilmu Sosial*, Kopertis Wilayah X, Padang
- Sulistiyono Adi, 2006, *Krisis Lembaga Pengadilan di Indonesia*, UNS Press, Surakarta
- Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Victor Yaved Neno, 2006, *Implikasi Pembatasan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Jurnal:

- Azzahrawi, Azzahrawi, Husni Djalil, and Zahratul Idami. "Wewenang Dan Kendala Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Menyelesaikan Sengketa Kepegawaian Setelah Upaya Administratif." *Syiah Kuala Law Journal* 3, no. 2 (2019): 202-221
- Dybowski, M. (2018). Articulating Ratio Legis and practical reasoning. In *Ratio Legis* (pp. 29-55). Springer, Cham.
- Hadi, Martinus. "Tanggung Jawab Bpn Terhadap Sertipikat Yang Dibatalkan Ptun." *Lex et*

- Hadjon, Philipus M. "Peradilan Tata Usaha Negara dalam Konteks Undang-Undang No. 30 Th. 2014 tentang Administrasi Pemerintahan." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 4, no. 1 (2015): 51-64.
- Kusdarini, E. 'Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Tata Usaha Negara', *Efisiensi - Kajian Ilmu Administrasi*. doi: 10.21831/efisiensi.v3i1.3793. 2015
- Lestari, R. 'Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia', *Jurnal Ilmu Hukum Riau*. 2013.
- Putrijanti, Aju. *Kewenangan Serta Obyek Sengketa Di Peradilan Tata Usaha Negara Setelah Ada Uu No. 30 / 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*. Masalah-Masalah Hukum. 44. 425. 10.14710/mmh.44.4.2015.425-430. 2015
- PUSPITASARI, MUTIARA AYU, LAPON TUKAN LEONARD, and Aju Putrijanti. "RATIO DECIDENDI HAKIM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MEMUTUS SENGKETA TATA USAHA NEGARA TENTANG LINGKUNGAN HIDUP BERKAITAN DENGAN PENERAPAN ASAS DOMINUS LITIS (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 062/G/LH/2016/PTUN. SMG)." PhD diss., Universitas Diponegoro, 2019.
- Poitras, Jean & Tareau, Aurélie. (2008). Dispute Resolution Patterns and Organizational Dispute States. *International Journal of Conflict Management*. 19. 72-87. 10.1108/10444060810849191. 2007.
- Pratama, Y., Tirtasah, M. I., Ahmady, Y. N., & Wardhana, A. (2019). PENGATURAN HUKUM MENGENAI KEDUDUKAN KEPUTUSAN YANG DIMOHONKAN KEPADA PEJABAT TATA USAHA NEGARA. *Perspektif Hukum*, 19(1), 167-181.
- Ridwan, Despan Heryansyah, dan Dian Kus Pratiwi. Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 2 VOL. 25 MEI 2018*: 339 – 358. 2018.
- Tamam, A.A.B. and Astuti, P., 2021. ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT (Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 97 K/Pid/2017). *NOVUM: JURNAL HUKUM*, pp.1-10.
- Tjandra W. Riawan, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Yogyakarta:Penerbitan Universitas Atma Jaya, 2005)
- Yasser, B. M. 'Penguujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Pada Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Kaitannya Dengan Tindak Pidana Korupsi', *Soumatra Law Review*. doi: 10.22216/soumlaw.v2i1.3558. 2019

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. 29 Oktober 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 29 Oktober 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160. Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. 17 Oktober 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292. Jakarta.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan melanggar Hukum oleh Badan/Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad).